

## **SURAT TERBUKA**

**Kepada YM. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  
dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.**

**Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
yang saya hormati,**

Perkenalkan saya, **Kuncoro Budy Prayitno**, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Ahli Peneliti Madya dengan **NIP. 680001938 / 19580225.198702.1.001**, di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (**BPPT**).

**Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
yang saya hormati,**

Beberapa waktu yang lalu saya membaca di salah satu mas media bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Pensiun yang Mendadak dan Dipaksakan (bukan alamiah) terhadap PNS (terlampir). Tetapi mengapa kami Peneliti Madya (sebagai PNS) “Dipaksa Pensiun” dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP No.11/2017) .....?

Dapat saya sampaikan bahwa, PP No. 11 Tahun 2017 khususnya Pasal 354 tersebut sangat diskriminatif dan menyakitkan bagi kami (Peneliti Madya) yang harus dipaksa pensiun tiba-tiba tanpa ada jeda atau tenggang rasa dan itu hanya karena “Perbedaan Usia” sebelum dan sesudah tanggal diundangkannya PP No. 11 Tahun 2017 (pada tanggal 7 April 2017).

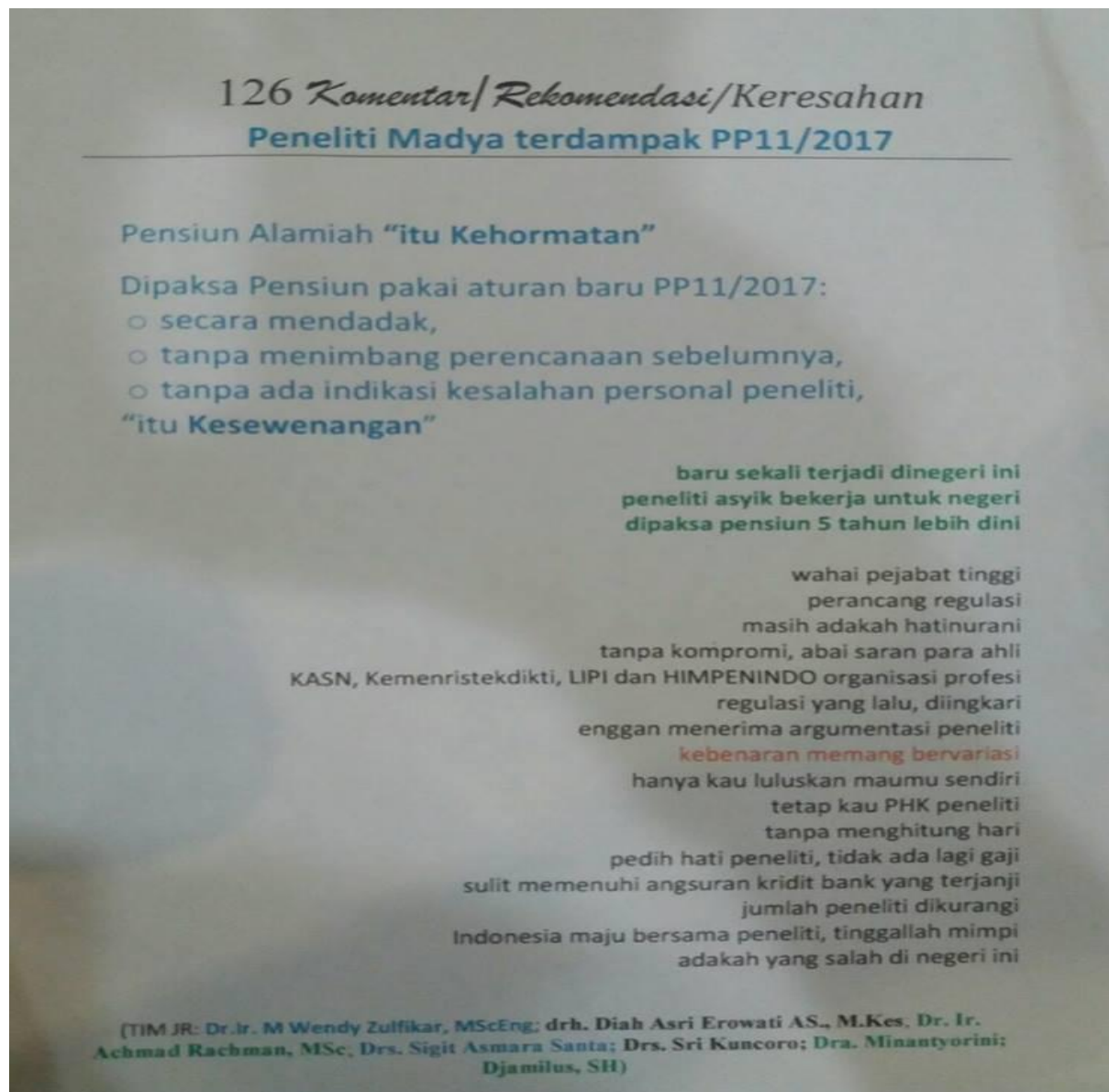
Pasal 354, PP No. 11 Tahun 2017 tersebut berdampak terhadap kami, Peneliti Madya khususnya yang lahir pada tanggal 8 April 1957 dan sesudahnya (usia di bawah 60 tahun) diharuskan/ditetapkan pensiun dengan Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun, sedangkan yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957 (6 April 1957 atau usia lebih dari 60 tahun) tidak dipensiunkan, diberi keistimewaan BUP nya tetap 65 tahun. Kami sebagai PNS yang saat ini masih berusia di bawah 60 tahun, tidak bisa mengerti apa dasar dan landasan dikeluarkan Pasal 354, PP No. 11 Tahun 2017, yang sangat diskriminatif dan tidak adil tersebut.

**Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
yang saya hormati,**

Kami sebagai PNS yang kebetulan sedang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Madya (terdapat sekitar 556 orang Peneliti Madya yang tersebar pada 30 Lembaga/Kementerian yang harus pensiun akibat PP No. 11 Tahun 2017 dalam kurun waktu 3 tahun ke depan) merasa tidak mendapat keadilan yang semestinya. Mengapa PP No. 11 Tahun 2017 diberlakukan kepada kami yang pada saat ini sudah menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Madya. Biasanya peraturan perundangan yang ditetapkan atau diundangkan diberlakukan bagi yang belum atau baru (akan) mengajukan Jabatan Fungsional tertentu.

Kami mohon keadilan dan kebijakan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dapat meninjau kembali dan berkenan untuk merevisi Pasal 354, PP No. 11 Tahun 2017 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga kami dengan ikhlas dan penuh persiapan dapat menjalani masa pensiun kami.

Semoga Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mau mendengar keresahan hati kami Peneliti Madya, seperti di bawah ini:



Demikian surat ini saya buat secara terbuka. Mohon dimaafkan apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Atas perhatian dan respon dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,  
**Drs. Kuncoro Budy Prayitno, MSc.**  
Ahli Peneliti Madya, PTKS-BPPT, NIP. 19580225.198702.1.001.

## Lampiran.

Mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih ingat “sesuatu” seperti yang tertulis pada Artikel di bawah ini.

## Ini Penjelasan Jokowi soal Rasionalisasi PNS

Fabian Januarius Kuwado

Kompas.com - 07/06/2016, 12:04 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/07/12043241/ini.penjelasan.jokowi.soal.rasionalisasi.pns>



Presiden Joko Widodo di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/6/2016). (Fabian Januarius Kuwado)

**JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yang menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, menurut Jokowi, tidak benar. Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.**

**"Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).**

Dengan strategi itu, kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi Pemerintah Indonesia akan lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai juga akan semakin efisien.

(Baca: [Jokowi Instruksikan Seluruh Pejabat Berlari Cepat](#))

Jokowi mengatakan, strategi semacam itu perlu dilakukan. Sebab, biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.

"Kami ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Kalau itu dilakukan, suatu saat dapat tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul berkualitas dan belanja lebih efisien," ujar dia. Jokowi mengingatkan bahwa rencana itu tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu atau dua tahun. Rencana itu dapat berhasil jika dilakukan dalam kurun waktu yang panjang.

(Baca: [Wapres: Tidak Ada PNS Tiba-tiba Dipensiunkan](#))

Jokowi juga mengatakan, rencana itu sampai saat ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Rencana dan konsep dari Menpan-RB itu ya memang belum saya terima," ujar Jokowi.

Seperti dikutip *Kompas*, Kementerian PAN-RB mengemukakan proses pemetaan untuk 1 juta rasionalisasi PNS sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.

(Baca: [Menteri Yuddy Diminta Publikasi Hasil Audit PNS Sebelum Lakukan Rasionalisasi](#))

Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Sandro Gatra

## Wapres: Tidak Ada PNS Tiba-tiba Dipensiunkan

Kompas.com - 03/06/2016, 16:36 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/03/16363671/wapres.tidak.ada.pns.tiba-tiba.dipensiunkan>



Wakil Presiden Jusuf Kalla. (KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Pemerintah kepada jutaan pegawai negeri sipil, melainkan pertumbuhan negatif sumber daya PNS.

**"Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK (karena) pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja, ini katakanlah cuma 'negative growth',"** kata Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/6/2016), seperti dikutip *Antara*.

"Negative growth" atau pertumbuhan negatif jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilakukan mengingat ada program moratorium penambahan pegawai negeri.

"*Negative growth* itu nantinya (selama) delapan tahun, rencananya karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang," tuturnya.

Wapres menjelaskan, moratorium penambahan selama delapan tahun itu dilakukan dengan perhitungan ada selisih sebanyak 500.000 pegawai yang pensiun hingga 2019.

"Ini kan moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah (PNS). Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya, yang diganti hanya 50 orang karena semuanya sudah melalui teknologi," jelasnya.

Wapres pun menceritakan pegawai negeri sipil yang kurang efektif juga terjadi di kantornya, di mana banyak pegawai yang keahliannya tidak diperlukan karena kemajuan teknologi.

"Seperti di kantor saya berlebihan juga, karena dulu ada bagian arsip, fotokopi, operator telepon, yang semua sudah tidak dibutuhkan lagi akibat (kemajuan teknologi)," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, proses tersebut akan dimulai secara bertahap, mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian.

"Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan. Akhirnya biaya pelayanan publik secara presentase menurun walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin 'roadmap'-nya. Kita minta delapan tahun roadmapnya," ujar Wapres Kalla.

Editor : Sandro Gatra

Sumber : [ANTARA](#)